

## Evaluasi Kebijakan Sosial di Daerah Tertinggal Kabupaten Nias Barat

<sup>1</sup>Gunawan Undang

<sup>1</sup>Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI), Medan, Indonesia; gunawanundang@gmail.com

Received: November 11, 2022; In Revised: December 3, 2022; Accepted: February 28, 2023

### Abstract

Social policy evaluation in West Nias Regency is important, considering the phenomenon shows that the district is still a disadvantaged area, experiencing budget political inequality, and lack of governance innovation. This article aims to evaluate the problem from the social dimension and social policy dimensions. This study uses a qualitative descriptive method with data sources from the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia (Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia, 2023) and the Central Statistics Agency (BPS, 2023) as well as the results of previous research. The results of the study show that the evaluation of social policies in West Nias Regency -- as a disadvantaged area -- can be seen from the social dimension and the social policy dimension: (1) From the social dimension, it is important to prioritize equity and justice considering that there is still a high disparity in budget allocation and is below the provincial average, with the lowest Regional Original Revenue (PAD), Transfer Funds, Other Revenues, and Regional Budget (2022). PAD's contribution to the regional budget is only 2%. However, internally, this district has been relatively able to improve its social problems, winning the Innovative Government Awards (IGA Awards) in the category of Innovative Disadvantaged Areas (2022); and (2) from the social policy dimension, this district is important to innovate, such as local governance innovation and public service innovation with the target of developing government service digitalization activities; poverty alleviation; ease of investment; and stability, security and social life. The novelty of this research can have implications for quality and innovation in governance and public services so as to accelerate the improvement of West Nias Regency's status as a disadvantaged area.

**Keywords:** evaluation, social policy, disadvantaged areas

### Pendahuluan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan kebijakan sosial untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan di Indonesia. Salah satu kebijakan sosial tersebut adalah Pasal 262 ayat 2, yang menjelaskan bahwa rencana pembangunan daerah harus memperhatikan percepatan pembangunan daerah tertinggal, dengan kata lain "memperhatikan percepatan pembangunan daerah". Namun dalam kenyataannya – seperti dari perpektif politik anggaran -- dari 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumut, wilayah Kepulauan Nias masih menunjukkan disparitas dengan wilayah lain dalam perolehan APBD; di antaranya Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, dan Kota Gunungsitoli, yang APBD-nya masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata provinsi (Rp 1,40 triliun). Lima daerah tersebut termasuk di antara 29 kabupaten/kota di Provinsi Sumut yang memiliki PAD di bawah rata-rata provinsi; Nias Barat bahkan menerima PAD paling rendah (15 miliar) (Undang, Gunawan, et al., 2023-a).

Situasi yang tidak menguntungkan tersebut tidak sebanding dengan potensi wilayah yang dimikinya. Kabupaten Nias Utara memiliki potensi unggulan dalam sektor pariwisata, pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta objek wisata alam, budaya, sejarah, dan agraria yang tersebar di kawasan ekonomi wisata SOZIONA (Somi-Bozihona-Onolimbu-Nalawo) (Lase et al., 2018); Kabupaten Nias Selatan memiliki potensi unggulan dalam sektor pariwisata, pertanian, kehutanan, dan perikanan (Fau, 2018), pariwisata (Puspita, 2019); Kabupaten Nias Utara memiliki potensi unggulan dalam bidang pertanian, kehutanan, dan ekonomi, yang berkontribusi sebesar 52,25% terhadap perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PRDB) (2020–2022) karena kontribusi dan potensi pajak daerah dan retribusi sedang (Ilmiha, 2023). Sedangkan Kabupaten Nias Barat memiliki potensi Pantai Sirombu, Pulau Asu, Pantai Gu'u,

Pantai Fari'i, Pantai Ture, Pantai Fadaya, Pantai Valaete, Pulau Bawa, Bale, Bukit Hermon, Rumah Adat, dan Batu Megalit di Desa Lahomi, Desa Lolozirugi, dan Desa Sisarahili (Liyushiana, 2019); Kota Gunungsitoli berpotensi di sektor pariwisata (Sismudjito et al., 2018); memiliki Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebanyak 8.722 pelaku usaha (Putra, et al., 2018). Untuk pengembangan wilayah dan potensi tersebut, penting dibangun pusat-pusat pertumbuhan dan wilayah pendukungnya (Gulo, 2015). Dari aspek implementasi kebijakan politik anggaran, postur APBD Kabupaten Nias Barat (Rp 723.26 milyar) berada di bawah rata-rata provinsi (Rp 1.40 triliun); rangking ke-29 dari 33 kabupaten/kota. Namun kebutuhan belanja daerah (Rp 756.31 milyar) lebih besar daripada PAD (Rp 15.06 milyar) dan pendapatan lain-lain (Rp 18.06 milyar) sehingga dana transfer dari APBN mencapai Rp 690.13 milyar. Besaran anggaran tersebut pun masih mengalami defisit anggaran (Rp 33.05 milyar) untuk memenuhi belanja daerahnya. Kontribusi PAD terhadap APBD paling kecil, yakni hanya 2%. Artinya, 98% APBD bergantung pada APBN (Tanjung, Ali Mukti, et al., 2023).

Kabupaten Nias Barat -- yang terletak di Kepulauan Nias -- termasuk wilayah tertinggal di Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Dari perpektif kebijakan sosial, ketimpangan sosial tersebut penting diteliti, terutama dari perpektif evaluasi kebijakan dalam pengelolaan daerah tertinggal. Bagaimana kondisi objektif implementasi kebijakan sosial di Kabupaten Nias Barat sebagai daerah tertinggal? Implikasi penelitian ini penting dirumuskan sebagai hasil dari evaluasi implementasi kebijakan di Kabupaten Nias Barat sebagai daerah tertinggal.

### **Metode Penelitian**

Pengembangan hipotesis deduktif (Bitektine, 2008), Waters, 1987, dan Mahootian & Eastman, 2009), melalui pendekatan ilmu-ilmu sosial, dilakukan melalui pendekatan kualitatif (Abowitz & Toole, 2010; Rezvizi et al., 2022; dan Syawaludin, 2023). Hipotesis deduktif dapat saling melengkapi, menghasilkan referensi, dan diandalkan dalam penelitian kualitatif untuk membangun teori. Data penelitian bersumber dari Kemendagri (2023), Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), dan hasil penelitian sebelumnya. Data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif dan diharapkan menghasilkan hipotesis deduktif sebagai kebaruan (novelty) kajian ini.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Teori Kebijakan Publik**

Konsep dasar kebijakan publik, perumusan kebijakan publik, analisis kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, pemantauan hasil kebijakan publik, dan evaluasi kebijakan publik termasuk ke dalam ruang lingkup kebijakan publik. Selain itu, kebijakan publik dan pelayanan publik juga termasuk dalam ruang lingkungannya. Kebijakan publik adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan publik terdiri dari empat komponen utama: tujuan kebijakan, masalah, tuntutan (demand), dan dampak atau hasil (Handoyo, 2012). Kebijakan publik adalah suatu sistem tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga untuk memecahkan masalah tertentu melalui tahapan pengelolaan masalah dan pembuatan regulasi (tahap formulasi), implementasi (tahap implementasi), monitoring, dan evaluasi implementasi regulasi (tahap evaluasi), serta implementasi reformulasi kebijakan. Kebijakan publik adalah subbagian dari administrasi publik (public administration) dan salah satu konsentrasi administrasi publik (Undang, Gunawan, 2023-b). Perumusan kebijakan -- seperti dalam penataan wilayah -- bertujuan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan, pemerataan pembangunan, serta pengendalian dan pertimbangan pertumbuhan penduduk (Gunawan Undang, 2022-a). Menurut Blackwell (1951, 1953; dalam Kim & Kim, 1995), sistem informasi sangat penting bagi pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai agen pemerintah pusat dan membuat keputusan tentang pelayanan

publik. Ini terutama berlaku untuk menjalankan urusan pemerintah pilihan di bidang pengelolaan sumber daya kepulauan yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan (Hankam). Ini juga mencakup prinsip eksternalitas untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia.

### **Teori Kebijakan Sosial**

Kebijakan sosial adalah ilmu kebijakan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau kualitas hidup masyarakat dalam mencapai negara kesejahteraan (*welfare state*). Kebijakan kesejahteraan sosial juga dikenal sebagai pelayanan sosial secara lebih luas (Undang, Gunawan, 2023-b). Amerika Serikat telah menerapkan kebijakan sosial urusan pemerintahan konkuren di bidang kesehatan (Bauml et al., 2019). Baik secara teoritik maupun empiris, eksplorasi terhadap pengangguran distribusi pendapatan dan resiko. Ini contoh kebijakan sosial di tingkat mikro. Namun, pada tingkat makro, hasil penelitian menunjukkan korelasi negatif yang jelas dan signifikan secara statistik: semakin merata risiko pengangguran terdistribusi, semakin merata risiko pengangguran terdistribusi. Ini adalah hasil dari penelitian pada level makro (Rehm, Philip, 2011).

Kebijakan sosial ditetapkan sebagai bagian dari operasi pemerintahan oleh pemerintah nasional dan daerah. Kebijakan sosial menjadi bagian tersendiri dalam operasi desentralisasi pemerintahan. Dalam hal ini, kebijakan sosial didefinisikan sebagai program dan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau meningkatkan martabat dan harkat manusia (Thahir, Baharuddin, 2019). Desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi (Undang, Gunawan, 2022-b).

Analisis kebijakan sosial dengan studi kasus di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menunjukkan bahwa APBD Tahun 2022 untuk 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumut menunjukkan *flypaper effect* karena daerah masih bergantung pada "penerimaan transfer" dari pemerintah pusat (88,49%), dengan kontribusi PAD dan fiskal daerah tetap rendah (11,51%). Dalam jangka panjang, ketidaksesuaian ini dapat mengakibatkan "ketergantungan daerah" dan ketidakmandirian daerah dari pemerintah pusat. Akibatnya, makna otonomi daerah dan desentralisasi menjadi ambigu (Undang, Gunawan, et al., 2023-a).

Kebijakan sosial di Wilayah Kepulauan Nias berdampak pada pelaksanaan urusan pemerintah konkuren di daerah kepulauan sehingga secara teoritis, kondisi ini penting untuk mempertimbangkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional dalam memperlakukan daerah kepulauan melalui peningkatan dana transfer, seperti DAU dan DAK. Hasil kajian semacam ini dapat digunakan untuk menilai kebijakan pemerintah pusat dan provinsi (Tanjung, Ali Mukti, et al., 2023).

### **Evaluasi Kebijakan Publik**

Bertitik tolak dari pendapat Chazali H. Situmorang (2016), Iman Amanda Permatasari, (2020) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan berkaitan kuat dengan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan variabel paling penting yang sangat besar dalam penyelesaian berbagai masalah publik, sebagai bukti respon pemerintah dan cara yang tepat dalam memenuhi kepentingan masyarakat. Sedangkan evaluasi kebijakan merupakan akhir dari proses kebijakan sehingga dapat dilihat proses berjalannya implementasi kebijakan, kekurangan, kelebihan, dan hasil dari kebijakan, apakah bersifat positif atau negatif. Evaluasi kebijakan pun menjadi tolak ukur terhadap kebijakan-kebijakan selanjutnya yang akan diambil pemerintah atau pelaksana. Evaluasi kebijakan bertujuan untuk menemukan penyebab kegagalan kebijakan dan apakah berdampak terhadap yang dicita-citakan. Evaluasi kebijakan pun merupakan kegiatan fungsional yang tidak hanya dilakukan diakhir, tetapi juga pada setiap tahapan kebijakan yang meliputi kekhususan (*pesification*), pengukuran (*measurement*), analisis, dan rekomendasi. Terdapat tiga tipe evaluasi kebijakan, yakni 1) evaluasi sebagai kegiatan fungsional; 1) evaluasi yang berfokus pada kinerja; dan 2) evaluasi kebijakan

sistematis yang memberikan jawaban terhadap tujuan awal, biaya-biaya yang digunakan dan keuntungan yang diraih, serta penerima keuntungan. Beberapa langkah dalam mengevaluasi kebijakan, antara lain melakukan identifikasi terhadap tujuan program, analisis permasalahan, deskripsi dan standarisasi kegiatan, melakukan pengukuran pada setiap tahap perubahan, menetapkan penyebab yang menciptakan perubahan, dan indikator-indikator penentu kemunculan dampak. Sedangkan unsur yang harus dilakukan evaluator dalam pelaksanaan evaluasi meliputi 1) output kebijakan (hasil dari kebijakan); 2) kemampuan dalam memperbaiki masalah sosial; dan 3) konsekuensi atau dampak dari sebuah kebijakan yang memiliki lima dimensi, yakni dampak pada masalah publik dan pada orang-orang yang terkait di dalamnya, dampak pada keadaan kelompok lain di luar sasaran sebuah kebijakan, dampak terhadap keadaan saat ini dan juga masa depan, dan biaya yang secara tidak langsung ditanggung masyarakat. Hambatan yang mungkin dihadapi di antaranya 1) adanya ketidakpastian akan tujuan; 2) kausalitas; 3) penyebaran dampak dari kebijakan di dalam dan di luar kepentingan kelompok; 4) sulitnya mendapatkan data khususnya statistik dan informasi yang sesuai; 5) resistensi pejabat; dan 6) hasil evaluasi tidak berdampak sehingga kurang mendapat perhatian bahkan diabaikan masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh faktor a) sumber yang tidak mencukupi; b) metode pelaksanaan kebijakan; c) kebijakan hanya berfokus pada satu permasalahan; d) cara masyarakat memberi respon dan membiasakan diri dengan kebijakan publik; e) tujuan kebijakan bertentangan dengan yang lainnya; f) biaya yang besar; g) banyak masalah publik yang perlu diselesaikan; dan h) berkaitan dengan sifat masalah yang akan diselesaikan dalam sebuah tindakan kebijakan.

### ***Evaluasi Kebijakan Sosial di Kepulauan Nias***

Di Wilayah Kepulauan Nias, kebijakan sosial Urusan Pemerintahan Konkuren Pilihan masih mengalami ketimpangan, terutama dalam hal pembagian anggaran. Studi Tanjung, Ali Mukti, et al. (2023) menemukan bahwa (1) dari 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, 5 kabupaten/kota di daerah kepulauan Nias (Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, dan Gunungsitoli) mengalami ketimpangan alokasi anggaran yang signifikan dengan 28 daerah non-kepulauan (daratan) lainnya dan berada di bawah rata-rata provinsi. Pertama, dari lima kabupaten dan kota di Kepulauan Nias, hanya Kabupaten Nias Selatan dengan APBD sebesar Rp 1,44 triliun yang melebihi rata-rata provinsi sebesar Rp 1,40 triliun, menempati peringkat ke-9, yang merupakan peringkat terendah dari sembilan daerah yang memiliki APBD yang lebih tinggi dari rata-rata provinsi. PAD (Rp 56,50 milyar) dan pendapatan tambahan (Rp 45,20 milyar) pun kurang dari kebutuhan belanja daerah (Rp 1,48 triliun), sehingga dana transfer bergantung dari APBN mencapai Rp 1,34 triliun. Selain itu, untuk memenuhi belanja daerah, anggaran tersebut masih mengalami defisit sebesar 42 milyar rupiah. Dengan kontribusi PAD hanya 4% terhadap APBD sehingga 96% APBD bergantung pada dana transfer pemerintah pusat (APBN). Demikian juga PAD (Rp 56.50 milyar) dan pendapatan tambahan (Rp 45.20 milyar) kurang dari kebutuhan belanja daerah (Rp 1,48 triliun), sehingga dana transfer dari APBN mencapai Rp 1,34 triliun. Anggaran ini masih mengalami defisit anggaran sebesar 42 milyar untuk memenuhi belanja daerah (Tanjung, Ali Mukti, et al., 2023).

### ***Evaluasi Kebijakan Sosial: Kasus Daerah Tertinggal di Kab. Nias Barat***

Pertama, evaluasi kebijakan dari perpektif dimensi sosial. Dalam pembangunan yang berkelanjutan, beberapa dimensi sosial yang penting diperhatikan sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan sosial, antara lain dimensi sosial, dimensi ekonomi, dan dimensi lingkungan. Ketiga dimensi tersebut saling berhubungan. Dalam pembangunan yang berkelanjutan, ketiga dimensi tersebut penting memperhatikan aspek 1) pemerataan dan keadilan (equity and justice); 2) pendekatan integratif (integrative approach); 3) perspektif jangka panjang (long term perspective); 4) keberlanjutan ekologis (ecological sustainability); 5) keberlanjutan ekonomi (economic sustainability); 6) keberlanjutan sosial budaya (social

cultural sustainability); 7) keberlanjutan politik (political sustainability); dan 8) keberlanjutan pertahanan dan keamanan (defense and security sustainability) (Mulyadi, Mohammad, et al., 2015).

- 1) Dimensi pemerataan dan keadilan (equity and justice). Salahsatu dimensi dalam pemerataan dan keadilan, hasil studi menunjukkan bahwa telah terjadi disparitas antar-kawasan di Provinsi Sumut, yakni antara Kawasan Pantai Barat dengan Kawasan Dataran Tinggi dan Kawasan Pantai Timur. Kawasan Pantai Barat terdiri atas Kab. Nias, Kab. Nias Utara, Kab. Nias Barat, Kab. Mandailing Natal, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Padang Lawas, Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Nias Selatan, Kota Padang Sidempuan, Kota Sibolga dan Kota Gunungsitoli. Kawasan Dataran Tinggi meliputi Kab. Tapanuli Utara, Kab. Toba Samosir, Kab. Simalungun, Kab. Dairi, Kab. Karo, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Samosir, dan Kota Pematangsiantar. Sedangkan Kawasan Pantai Timur melingkupi Kab. Labuhanbatu, Kab. Labuhanbatu Utara, Kab. Labuhanbatu Selatan, Kab. Asahan, Kab. Batu Bara, Kab. Deli Serdang, Kab. Langkat, Kab. Serdang Bedagai, Kota Tanjungbalai, Kota Tebing Tinggi, Kota Medan, dan Kota Binjai (BPS Prov. Sumut, 2023). Dari 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumut, lima kabupaten/kota di daerah Kepulauan Nias (Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, dan Gunungsitoli) mengalami ketimpangan alokasi anggaran yang signifikan, dengan 28 daerah non-kepulauan (daratan) berada di bawah rata-rata provinsi. Dari lima kabupaten/kota tersebut, Kabupaten Nias Barat (2022) yang paling rendah dalam perolehan PAD (Rp15 milyar), Dana Transfer (Rp 690 juta), Pendapatan Lain-lain (Rp 18 juta), dan APBD (2022) hanya Rp 723 juta. Dan kontribusi PAD terhadap APBD (2022) pun paling rendah, yakni hanya 2% (Undang, Gunawan, 2023-a).
- 2) Dimensi pendekatan integratif (integrative approach). Pendekatan integratif dalam meminimalisasi ketimpangan pembangunan khususnya di Kabupaten Nias Barat – sebagai bagian yang paling tertinggal wilayah Kepulauan Nias dan Kawasan Pantai Barat – penting mempertimbangkan rentang kendali (span of control) baik dari wilayah perkotaan (Kota Gunung Sitoli) maupun dari ibukota provinsi (Kota Medan). Pendekatan terintegratif tersebut penting diperhatikan dari aspek perencanaan dan pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Detil Tata Ruang (RDTL) guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah.
- 3) Dimensi jangka panjang (long term perspective). Dalam jangka panjang, evaluasi kebijakan yang penting diperhatikan antara lain komitmen seluruh stake holders baik di pusat maupun di daerah untuk mendukung seluruh aspek utama pembangunan yang terimplementatif yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) serta dimasukkan ke dalam APBN dan APBD, termasuk daya dukung DAU dan DAK dengan perlakuan “khusus”.
- 4) Dimensi keberlanjutan ekologis (ecological sustainability). Secara umum, ekologi lingkungan Kepulauan Nias adalah wilayah laut yang berada di Kawasan Samudera Hindia (Samudera Indonesia). Lingkungan tersebut sangat mempengaruhi ekologi budaya pesisir yang pada umumnya memiliki karakteristik “pelaut ulung”. Dilihat dari kebijakan sosial, wilayah tersebut penting diperhatikan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang relevan dengan kondisi lingkungan ekologi tersebut, terutama Kabupaten Nias Barat sebagai daerah tertinggal. Selain itu, intensitas gempa di Kepulauan Nias yang berdampak pada lingkungan ekologis penting diperhatikan. Gunawan Undang (2021) menjelaskan keberlanjutan pembangunan di daerah pesisir – dengan kasus disparitas pembangunan di Kawasan Samudera Hindia di Kawasan Jawa Barat Selatan – dapat dilihat dari beberapa unsur penting 4M (man, machine, material, dan metode).
- 5) Dimensi keberlanjutan ekonomi (economic sustainability). Potensi unggulan yang dapat dikembangkan di Kabupaten Nias Barat antara lain pariwisata seperti Pantai Sirombu, Pulau

Asu, Pantai Gu'u, Pantai Fari'i, Pantai Ture, Pantai Fadaya, Pantai Valaete, Pulau Bawa, Bale, Bukit Hermon, Rumah Adat, dan Batu Megalit di Desa Lahomi, Desa Lolozirugi, dan Desa Sisarahili (Liyushiana, 2019). Namun, kunjungan wisatawan asing pada tahun 2023 sangat rendah (59 orang), sedangkan wisatawan domestik hanya 40.125 orang. Jenis wisata dinominasi wisata budaya (170 jenis) sedangkan potensi wisata alam mencapai 30 jenis. Selain itu, yang berpotensi menunjang ekonomi daerah ini adalah Koperasi. Di Kabupaten Nias Barat pada tahun 2023, ada 74 unit koperasi yang tersebar di seluruh kecamatan. Koperasi terbanyak ada di Mandrehe sebanyak 26 unit, Sirombu sebanyak 14 unit, dan Lahomi sebanyak 12 unit (BPS, 2023). Kabupaten ini pun memiliki potensi tanaman obat tradisional seperti di Desa Orahili yang telah diwariskan dan digunakan secara turun temurun. Obat tersebut dapat digunakan untuk mengobati berbagai penyakit sebagai upaya pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, dan perawatan kesehatan (Daeli, Damai Yanti, 2023). Selain dari darat, potensi bahan baku obat-obatan pun bersumber dari laut. Faktor pentingnya untuk mengembangkan ekologi dan keberlanjutan ekonomi di Kabupaten Nias Barat adalah daya dukung energi, terutama pasokan tenaga listrik.

- 6) Dimensi keberlanjutan sosial budaya (social cultural sustainability). Pada tahun 2023, ada 15,39 juta orang yang tinggal di Sumatera Utara, dan 91.346 orang tinggal di Nias Barat. Menurut penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2023, Kota Medan memiliki IPM tertinggi sebesar 82,61, diikuti oleh Kota Pematangsiantar sebesar 80,46, dan Kota Tebing Tinggi sebesar 78,17. Sementara IPM Kabupaten Nias Barat sebesar 64,68; di bawah rata-rata IPM Nasional sebesar 74,39 (BPS, 2023).
- 7) Dimensi keberlanjutan politik (political sustainability). Salahsatu dimensi politik yang penting diperhatikan untuk mendukung tujuh dimensi lainnya, yakni dimensi pemerataan dan keadilan (equity and justice); dimensi pendekatan integratif (integrative approach); dimensi jangka panjang (long term perspective); dimensi keberlanjutan ekologis (ecological sustainability); dimensi keberlanjutan ekonomi (economic sustainability); dimensi keberlanjutan sosial budaya (social cultural sustainability); dan dimensi keberlanjutan pertahanan dan keamanan (defense and security sustainability) adalah daya dukung politik anggaran. Hasil kajian Gunawan Undang (2023-a) dan Tanjung, Ali Mukti, et al. (2023) salahsatu masalah krusial penyebab ketertinggalan Kabupaten Nias Barat adalah minimnya daya dukung politik anggaran dari pemerintah pusat dan daerah provinsi ke Kawasan Pantai Barat -- yang ada di Kepulauan Nias -- termasuk daya dukung politik anggaran ke Kabupaten Nias Barat. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Kawasan Pantai Barat dan Kepulauan Nias, Kabupaten Nias Barat merupakan daerah yang paling rendah dalam perolehan PAD (Rp15 milyar), Dana Transfer (Rp 690 juta), Pendapatan Lain-lain (Rp 18 juta), dan APBD hanya Rp 723 juta (2022). Demikian pula kontribusi PAD terhadap APBD (2022) paling rendah, yakni hanya 2%. Kami berasumsi bahwa hal ini merupakan salahsatu penyebab utama ketertinggalan Kabupaten Nias Barat.
- 8) Dimensi keberlanjutan pertahanan dan keamanan (defense and security sustainability). Kabupaten Nias Barat termasuk ke dalam wilayah Kepulauan Nias. Kepulauan tersebut berada di Kawasan Samudera Hindia (Samudera Indonesia) yang berhadapan dengan laut lepas internasional (batas negara) sehingga daerah tersebut termasuk Daerah Perbatasan Indonesia. Dari perspektif Hankam, hasil kajian (Undang, Gunawan, 2018 dalam Komarudin Tasdik dan Gunawan Undang, 2021) menjelaskan bahwa Samudera Hindia -- yang merupakan jalur perdagangan maritim dan energi -- adalah tempat di mana dunia bersaing untuk mendominasinya. Pelayaran Angkatan Laut India di Samudera Hindia telah meningkat 300 % sejak 2011. India sedang berusaha untuk mengimbangi China, yang telah mengerahkan kapal selam nuklir dan konvensional ke Samudera Hindia. Negara Tirai Bambu ini ingin membangun kekuatan maritim dengan melawan pengaruh India di Samudera Hindia (dalam Qodarsasi & Rachmawati, 2018). Thailand juga tidak ingin ketinggalan berebut pengaruh di Samudera Hindia. Sejak abad ke-17, mereka telah

merencanakan untuk membangun kanal di Tanah Genting Kra atau Isthmus Kra. Kanal baru ini akan menghubungkan Laut China Selatan dengan Samudera Hindia. Tiongkok memberikan bantuan dana kepada Thailand (Nota Kesepahaman, 19 Mei 2015). Dengan membangun kanal ini, kapal-kapal dagang tidak lagi harus melewati Selat Malaka, dapat mengurangi waktu perjalanan hingga 72 jam. Selain itu, kapal-kapal dagang tidak perlu melewati Singapura. Hal ini membuat hubungan China-Singapura tidak harmonis karena 76,2% PDB Singapura -- yang bersumber dari jasa dan industri -- bersumber dari Selat Malaka. Banyak pelabuhan di Indonesia dibangun di Laut Jawa, padahal dalam konteks dinamika Hankam dunia global Samudera Hindia lebih strategis. Pada 6 Maret 1997, Indian Ocean Rim Association (IORA) dibentuk. Asosiasi Negara-negara Pesisir Samudera Hindia ini terdiri dari 21 negara. IORA adalah forum regional yang melibatkan tiga pihak yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi, investasi, promosi, dan pembangunan sosial di Samudera Hindia (Undang, Gunawan, 2018). Hankam di Samudra Hindia pun mencakup hubungan Indonesia-Australia. Kedua negara ini berada di tepi Samudra Hindia. Secara geografis Pulau Christmas (Australia) yang berada di Samudera Hindia dan berhadapan langsung dengan negara Indonesia, lebih dekat ke negara kita daripada ke Australia. Selain itu, fenomena yang terjadi adalah meningkatnya pelayaran Angkatan Laut India di Samudera Hindia hingga 300 %. China memiliki kapal selam nuklir dan konvensional di Samudera Hindia. Fenomena perang di masa depan akan terjadi di laut dalam; samudera ini adalah samudera terdalam ketiga di dunia. Samudera Hindia berfungsi sebagai batas internasional bagi Indonesia. Blackwell (1951, 1953; dalam Kim & Kim, 1995) dalam kajian desentralisasi, Hankam merupakan urusan pilihan dalam pengelolaan sumber daya kepulauan untuk menjaga kedaulatan Indonesia.

Kedua, evaluasi kebijakan dari perpektif dimensi kebijakan sosial. Secara teoritik (Situmorang, Chazali H., 2016) dalam Iman Amanda Permatasari, (2020) menjelaskan bahwa unsur-unsur yang harus dilakukan evaluator dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan meliputi 1) output kebijakan (hasil dari kebijakan); 2) kemampuan dalam memperbaiki masalah sosial; dan 3) konsekuensi atau dampak dari sebuah kebijakan.

- 1) Output kebijakan (hasil dari kebijakan). Analisis terhadap output antara lain dapat menggunakan model Input-Output (I-O). Output suatu sektor terbesar seharusnya dapat memberikan multiplier terbesar pula pada penciptaan input antara sektor lainnya. Unit analisisnya di antaranya dapat difokuskan pada analisis pertumbuhan ekonomi daerah; analisis peningkatan pendapatan regional; analisis kebutuhan tenaga kerja sektoral; dan analisis sektor unggulan (Sutrisno, Hadi 2021). Dalam konteks output ini, Kabupaten Nias Barat memiliki laju pertumbuhan ekonomi 2,26 (2021) meningkat menjadi 3,01 (2022), dan 3,73 (2023); PAD Rp 12,7 milyar (2022) dan meningkat menjadi Rp 16 milyar (2023); pendapatan transfer Rp 704,9 milyar (2022) meningkat menjadi Rp 734 milyar (2023); Lain-lain pendapatan yang sah Rp 3,9 milyar (2022) meningkat menjadi Rp 5,9 milyar (2023) sehingga total APBD Rp 721, 4 milyar (2022) meningkat menjadi Rp 755, 7 (2023) (BPS, 2023). Meskipun mengalami peningkatan, namun jika dibandingkan dengan pendapatan daerah perkotaan -- seperti Kota Medan -- perbedaannya sangat ekstrim: pada tahun 2022 Kota Medan memperoleh PAD Rp Rp 3 triliun; dana transfer Rp 2,4 triliun; Pendapatan lain-lain Rp 1 trilion dengan total APBD (2022) sebesar Rp 6,7 triliun (Undang, Gunawan, 2023). Data seperti ini dapat dijadikan sebagai salahsatu alat ukur dalam memperbaiki kebijakan sosial di daerah tertinggal, seperti di Kabupaten Nias Barat.
- 2) 2) Kemampuan dalam memperbaiki masalah sosial. Secara internal, beberapa upaya yang dilakukan Kabupaten Nias Barat adalah melakukan inovasi agar terlepas statusnya dari daerah tertinggal. Salahsatu alat ukur evaluasi adalah Indeks Inovasi Pemerintahan Daerah, yakni Innovative Government Awards (IGA) yang dianugerahkan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) Tahun mulai 2017--2023. Kriteria penilaian IGA Awards tersebut adalah Provinsi Terinovasi, Kabupaten Terinovasi, Kota Terinovasi,

Daerah Perbatasan Terinovasi, dan Daerah Tertinggal Terinovasi. Meskipun dari 34 provinsi di Indonesia, Pemprov Sumut termasuk ke dalam 29 provinsi lainnya yang tidak memperoleh IGA Award, dan tidak satu pun memperoleh awards untuk Kriteria Kabupaten Terinovasi dan Kota Terinovasi, namun IGA Awards berdasarkan Kriteria Daerah Perbatasan Terinovasi diperoleh Kabupaten Batu Bara (2023) dan Kriteria Daerah Tertinggal Terinovasi yang diperoleh Kab. Nias Barat (2022) (Kemendagri, 2023). Secara umum fenomena ini menunjukkan bahwa inovasi daerah di Provinsi Sumut masih sangat rendah. Salah satu kendala utamanya diasumsikan adalah bahwa inovasi yang telah dikembangkan selama ini belum mengandung kebaruan dan belum memberi manfaat praktis secara menyeluruh kepada masyarakat. Selain itu, masih kurangnya kemampuan untuk mereplikasi inovasi digital maupun nondigital dalam penyelenggaraan kewenangan daerah, seperti inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan inovasi tematik yang ditetapkan pemerin pusat, inovasi pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, seperti perencanaan; keuangan; kepegawaian; pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan. Kendala tersebut dapat berimplikasi pada rendahnya kemampuan daerah dalam memperbaiki masalah sosial, termasuk di Kabupaten Nias Barat.

- 3) 3) Konsekuensi atau dampak dari sebuah kebijakan. Suatu kebijakan publik yang tidak berorientasi pada tatakelola pemerintahan yang baik dan pelayanan prima dapat berdampak serius terhadap masalah publik dan pada masyarakat daerah; berdampak terhadap keadaan kelompok lain di luar sasaran suatu kebijakan; dan berdampak pula terhadap keadaan saat ini dan juga masa depan. Selain itu, dapat pula berdampak pada meningkatnya biaya yang secara tidak langsung ditanggung masyarakat. Evaluasi kebijakan sosial di Kabupaten Nias Barat yang masih menyandang status daerah tertinggal penting diperhatikan dari aspek-aspek tersebut sebagai upaya perbaikan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan sehingga berdampak positif terhadap masyarakat dan kelompok sasaran, baik pada penanganan masalah saat ini maupun di masa yang akan datang sehingga Kabupaten Nias Barat tidak lagi menyandang daerah tertinggal. Hayrapetyan & Mnatsakanyan (2022, dalam Gunawan Undang, 2023-b) menjelaskan bahwa jika fenomena semacam ini merupakan dampak dari sebuah kebijakan yang tidak tepat, maka dapat memicu ketidakmandirian daerah sehingga reformasi administrasi kewilayahan harus dilakukan. Demikian pula Setiawan et al., (2022) dengan memperhatikan unsur terpenting organisasi pelaksana (pemerintahan), sumber daya, dan interpretasi kebijakan yang sesuai dengan arah, tujuan, dan sasaran implementasi kebijakan merupakan salahsatu cara untuk mengatasi masalah pengentasan kemiskinan dan keluar dai status daerah tertinggal di Kabupaten Nias Barat.

### **Simpulan**

Evaluasi terhadap kebijakan sosial di Kabupaten Nias Barat -- yang masih menyandang sebagai daerah tertinggal -- dapat dilihat dari dimensi sosial dan dimensi kebijakan sosial. Pertama, dari perpektif dimensi sosial, penting memprioritaskan pemerataan dan keadilan (equity and justice); pendekatan integratif (integrative approach); perspektif jangka panjang (long term perspective); keberlanjutan ekologis (ecological sustainability); keberlanjutan ekonomi (economic sustainability); keberlanjutan sosial budaya (social cultural sustainability); keberlanjutan politik (political sustainability); dan keberlanjutan pertahanan dan keamanan (defense and security sustainability). Penekanan terhadap dimensi pemerataan dan keadilan sangat penting sebagai upaya evaluasi dan identifikasi masalah kebijakan sosial mengingat secara umum di Provinsi Sumut masih terjadi disparitas antar-kawasan, yakni antara Kawasan Pantai Barat dengan Kawasan Dataran Tinggi dan Kawasan Pantai Timur. Kepulauan Nias -- sebagai bagian dari Kawasan Pantai Barat dan Kabupaten Nias Barat sebagai bagian dari wilayah Kepulauan Nias -- masih mengalami ketimpangan alokasi anggaran dan di bawah rata-



rata provinsi. Dari lima kabupaten/kota di Kepulauan Nias, Kabupaten Nias Barat (2022) yang paling rendah dalam perolehan PAD (Rp15 milyar), Dana Transfer (Rp 690 juta), Pendapatan Lain-lain (Rp 18 juta), dan APBD (2022) hanya Rp 723 juta. Demikian pula kontribusi PAD terhadap APBD (2022) paling rendah, yakni hanya 2%. Kedua, dari perspektif kebijakan sosial. 1) Model analisis yang dapat digunakan adalah model output kebijakan (hasil dari kebijakan), antara lain melalui pengembangan model Input-Output (I-O); 2) Dari perspektif kemampuan dalam memperbaiki masalah sosial, Kabupaten Nias Barat sebagai daerah tertinggal telah melakukan inovasi yang sangat baik sehingga indeks inovasi daerah ini meningkat dan memperoleh IGA Awards sebagai Daerah Tertinggal Terinovasi dari Kemendagri (2022); 3) dari perspektif konsekuensi atau dampak dari sebuah kebijakan sosial merupakan tantangan yang sangat nyata bagi pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk memperbaiki tatakelola pemerintahan Kabupaten Nias Barat. Beberapa inovasi yang dapat dikembangkan di kabupaten ini antara lain a) inovasi tata kelola pemerintahan daerah; b) inovasi pelayanan publik; dan c) inovasi lainnya berupa kewenangan daerah. Sedangkan sasaran inovasi tersebut antara lain dapat berupa a) digitalisasi layanan pemerintahan; b) penanggulangan kemiskinan; c) kemudahan investasi; dan d) stabilitas keamanan dan kehidupan sosial.

Beberapa hambatan dalam implementasi kebijakan sosial di Kabupaten Nias Barat yang penting diperbaiki (reformulasi kebijakan) antara lain faktor ketidakpastian tujuan kebijakan; dampak kebijakan (internal kelompok kepentingan, dan eksternal di luar kelompok kepentingan kelompok); ketidakseimbangan antara sumberdaya alam dengan kecukupan sumber daya manusia dalam melakukan inovasi layanan masyarakat; dan peran masyarakat dalam merespon kebijakan sosial. Kebaruan (novelty) penelitian ini dapat berimplikasi pada kualitas dan inovasi tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik sehingga dapat mempercepat perbaikan status Kabupaten Nias Barat sebagai daerah tertinggal.

### Referensi

- Abowitz, D. A., & Toole, T. M. (2010). Mixed Method Research: Fundamental Issues of Design, Validity, and Reliability in Construction Research. *Journal of Construction Engineering and Management*, 136(1), 108–116. [https://doi.org/10.1061/\(asce\)co.1943-7862.0000026](https://doi.org/10.1061/(asce)co.1943-7862.0000026).
- Bauml, J. M., Vinnakota, R., Anna Park, Y. H., Bates, S. E., Fojo, T., Aggarwal, C., Di Stefano, J., Knepley, C., Limaye, S., Mamtani, R., Wisnivesky, J., Damjanov, N., Langer, C. J., Cohen, R. B., & Sigel, K. (2019). Cisplatin Versus Cetuximab With Definitive Concurrent Radiotherapy for Head and Neck Squamous Cell Carcinoma: An analysis of Veterans Health Affairs Data. *Cancer*, 125(3), 406–415. <https://doi.org/10.1002/cncr.31816>.
- Bitektine, A. (2008). Prospective case study design: Qualitative method for deductive theory testing. *Organizational Research Methods*, 11(1), 160–180. <https://doi.org/10.1177/1094428106292900>.
- BPS Nias Barat. (2023). Nias Barat Dalam Angka. Nias: BPS Kabupaten Nias. ISSN: 2572-287X.
- BPS Provinsi Sumatera Utara. (2023). Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka. Kota Medan: BPS Provinsi Sumatera Utara.
- Daeli, Damai Yanti. (2023). Studi Etnobotani Tanaman Obat Tradisional pada Masyarakat di Desa Orahili Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat, Tunas: Jurnal Pendidikan Biologi, 4(1), 1-16. P-ISSN: 2715-1999, E-ISSNF: 2829-0909.
- Fau, J. F. (2018). Analisis Potensi Sektoral Ekonomi Kabupaten Nias Selatan Metode Analisis Shift-Share dan Location Quotient. *Jurnal Education and Development*, 5(1).
- Gulo, Y. (2015). Identifikasi Pusat-pusat Pertumbuhan dan Wilayah Pendukungnya dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Nias (Identification of Growth and Hinterland Area in Developing Nias District). *Widya Riset*, 18(1), 37–48.
- Handoyo, Eko. (2012). Kebijakan Publik. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri

- & "Widya Karya". ISBN: 978-602-8517-64-5.
- Ilmiha, J. (2023). Analisis Potensi Beberapa Sektor Ekonomi Kabupaten Nias Utara 2022. *Jurnal Simki Economic*, 6(1), 124–133. <https://jipened.org/index.php/JSE>.
- Kemendagri. (2023). *Pedoman Umum Penilaian dan Pemberian Penghargaan Innovative Government Award & Penjelasan Teknis Indikator Indeks Inovasi Daerah*. Jakarta: Kemendagri.
- Kim, S. K., & Kim, S. K. (1995). Efficiency of an Information System in an Agency Model. In *Econometrica* (Vol. 63, Issue 1).
- Lase, E., Sihombing, M., & Thamrin, H. (2018). Analisis Strategi Pengembangan Kawasan Pariwisata di Kabupaten Nias. *Anthropos, Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya*, 4(1), 126–138. <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/anthropos>
- Liyushiana. (2019). Pola Perjalanan Wisata di Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara. *Jurnal Khasanah Ilmu*, 10(2), 113–121.
- Liyushiana. (2019). Pola Perjalanan Wisata di Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara. *Jurnal Khasanah Ilmu*, 10(2), 113–121.
- Mahootian, F., & Eastman, T. E. (2009). Complementary Frameworks of Scientific Inquiry: Hypothetico-Deductive, Hypothetico-Inductive, and Observational-inductive. *World Futures: Journal of General Evolution*, 65(1), 61–75. <https://doi.org/10.1080/02604020701845624>.
- Mulyadi, Mohammad; Lestari, Tri Rini Puji; Alawiyah, Faridah; Wahyuni, Dinar; Astri, Herlina, Dina; Martiany; Rivani, Edmira; Qodriyatun, Sri Nurhayati. (2015). *Pembangunan Berkelanjutan: Dimensi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan*. Editor: Sali Susiana. Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika. ISBN: 978-602-1247-52-5.
- Permatasari, Iman Amanda. (2020). *Book Review, Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*, Judul Buku: Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan), Penulis: Chazali H. Situmorang (2016). *The Journalish: Social and Government*, 1(1) 034-038. ISBN: 978-602-74018-1-5.
- Puspita, N. (2019). Tourism Area Development Strategy in South Nias Regency. *Jurnal Kajian*, 24(2), 131–143. <http://www>.
- Putra, D. P., Nasir, M., & Rozaini, N. (2018). Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pendidikan, Pemberdayaan Ekonomi, Peningkatan Sarana dan Prasarana Serta Kesehatan di Kota Gunungsitoli: Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pertamina (Persero) Marketing Operating Region (MOR) I - Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Gunungsitoli. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 24(3), 776–786.
- Rehm, Philip. (2011). Kebijakan Sosial oleh Permintaan Rakyat. *Politik Dunia*, 63(02), 271 – 299. DOI: 10.1017/S0043887111000037.
- Rezvi, M. R., Kathy, A. A., Mahmood, P., Lima, A. N., & Mahmud, Z. (2022). Impact of COVID19 Pandemic in Bangladesh: A Perspective of Mental Health and Socio-Economic Status. *Khazanah Sosial*, 4(1), 65–75. <https://doi.org/10.15575/ks.v4i1.14065>.
- Sismudjito, S., Pohan, S., & Kariono, K. (2018). Mobilitas Sosial Penduduk Berbasis Industri Pariwisata Dalam Meningkatkan Status Sosial Ekonomi Masyarakat di Kota Gunung Sitoli, Nias Propinsi Sumatera Utara. *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*, 1(1), 203–213. <https://doi.org/10.32734/lwsa.v1i1.164>.
- Sutrisno, Hadi. (2021). Identifikasi Sektor Unggulan dan Simulasi Kebijakan Pembangunan Suatu Perekonomian. *Jurnal eBA* 8(1), 60-80. ISSN 2620-7958 (Online); ISSN 2407-8166 (Print).
- Syawaludin, M. (2023). Social Political Roots of Leadership Power In Ulu Malay Lampik Empat Merdike Duwe. *Khazanah Sosial*, 5(1), 90–103. <https://doi.org/10.15575/ks.v5i1.24140>.
- Tanjung, Ali Mukti, Undang, Gunawan, Primanto, Aji. (2023). Social Policy in the Implementation of Concurrent Government Affairs in the Nias Archipelago Area,

- Indonesia. *Khazanah Sosial* 5(2), 318-330. DOI: 10.15575/ks.v5i2.25728.
- Tasdik, Komarudin & Undang, Gunawan. (2021). Perspektif IT Dalam Pengembangan Jabar Selatan: Transparansi Potensi Desa Digital. *Indonesian Journal of Area Development and Policy (IADP)*, I(1), 1-9. <https://journal2.unfari.ac.id/index.php/IADP>.
- Thahir, Baharuddin. (2019). Kebijakan Sosial dan Otonomi Daerah. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 2(2), 91–102.
- Undang, Gunawan, Heri, Dina, Finaldin, T., Turyadi, I., Ardiansyah, I., & Dadang, A. (2021). ID-STM: A Framework of Regional Gap for Sustainability of an Underdeveloped Area. *JESTEC - Journal of Engineering Science and Technology, Special Is*, 88–106.
- Undang, Gunawan; Nuryani, E. R.; Alamsyah, Taufiq; Dina. (2022-a) Regional Arrange in The Province of West Java: A Formulation Policy. *Jurnal Sosiohumaniora*, 24(3), 324-334. ISSN 1411 – 0911; eISSN: 2443-2660. DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v24i3.31232.
- Undang, Gunawan. (2022-b). *Administrasi Keuangan Negara: Kebijakan Anggaran Negara dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah* (G. Gunardi, Ed.; 1st ed.). Bandung: Galeripadi. ISBN: 9786238832019.
- Undang, Gunawan; Suhendar, Deden; Heri, Nuryani R., Eny ; Sulaeman, A.; Dhina, M.A.; Darmawan, A. (2023-a). Policy Reformulation Action-Cycle Framework (PRACYF): A Case Study Decentralization and Regional Autonomy Policy in North Sumatra Province. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik (JMPP)*, Universitas Padjadjaran, Vol. 06 (02), pp 65-83, <http://dx.doi.org/10.24198/jmpp.v6i2.45021>.
- Undang, Gunawan. (2023-b). Buku Monografi: *ID-StM Frame Work & PRACYF: Model Analisis Disparitas Kebijakan Sosial dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Bandung: Unfari Press. ISBN: 978-623-09-5257-9.
- Waters, C. K. (1987). Relevance Logic Brings Hope to Hypothetico-Deductivism. *Philosophy of Science*, 54(3), 453–464. <https://doi.org/10.1086/289393>.